# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dana yang dikelola oleh pemerintah mencakup jumlah yang cukup besar. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen (Havidz Mabruri : 2010).

Sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga tinggi negara, memegang peran yang strategis dalam menilai kineja keuangan pemerintah daerah. Proses penilaian ini dilakukan dengan cara memeriksa laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk meningkatkan kualitas audit, BPK telah menerbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.

1 Tahun 2007 (Indira Januarti : 2010). Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalampelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan (Ika Sukriah : 2009).

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang dapat menunjang obyektifitas antara lain (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional obyek yang diperiksa, (3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, serta (5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis. Dalam Arens *dkk.* (2004) menyatakan nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor sehingga tidak mudah menjaga independensi, obyektifitas auditor.

Pengalaman kerja dan kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil

pemeriksaannya. Alim *dkk.* (2007) menyatakan bahwa kerjasama dengan obyek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas Independensi yang dimiliki auditor. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan obyek pemeriksaan selama penugasan dapat mempengaruhi obyektifitas auditor, serta bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas auditor. Oleh karena itu merupakan hal menarik untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh faktor-faktor pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan. Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens *dkk*., 2004). Sukriah, Akram dan Inapty (2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh obyektifitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan hasilnya positif. Semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu pengalaman auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2007), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Penelitian yang dilakukan oleh Lehman dan Norman (2006), mengenai pengaruh pengalaman pada

kompleksitas permasalahan serta audit judgment, menemukan bahwa auditor yang berpengalaman *(expertise)*, akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada auditor judgment. Hal ini dipertegas oleh Haynes et al (1998) dalam herliansyah dan Ilyas (2006) yang menemukan bahwa pengalaman audit yang dipunyai auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan *(judgment)* yang diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Penelitan ini bertujuan untuk meneliti factor-faktor yang mempengaruhi hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitan yang dilakukan oleh Mabruri dan Winarna (2010).

Pengetahuan seorang auditor dalam bidang audit juga dapat mempengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan. Menurut Brown dan Stanner (1983) dalam Mardisar dan Sari (2007), perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi (Tubbs, 1992) dalam Mayangsari (2003). Selain beberapa faktor diatas, faktor integritas auditor juga dapat berpengaruh terhadap kulitas hasil audit.

Sunarto (2003) dalam Sukriah, Akram dan Inapty (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diambil, penelitian sebelumnya menjadikan kabupaten Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri sebagai objeknya, sementara untuk penelitain ini memilih Kabupaten Boyolali, Klaten dan Sragen sebagai objek penelitian. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH".

## B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara independensi auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
2. Apakah terdapat pengaruh antara obyektifitas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
3. Apakah terdapat pengaruh antara pengalaman kerja auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
4. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan auditor terhadap kualitas

hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.

5. Apakah terdapat pengaruh antara integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh antara independensi auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara obyektifitas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara pengalaman kerja auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh antara integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi peneliti.

2. Bagi Lingkungan Pemerintah Daerah

   Menambah pengetahuan bahwa dalam suatu pemerintah daerah perlu adanya kualitas dalam penilaian suatu audit.

3. Bagi Peneliti Sebelumnya

   Penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumber acuan bagi pembaca atau penelitian lain untuk menjadi perbandingan terhadap masalah-masalah yang sama sebagaimana terdapat di muka.

**E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua adalah tinjauan pustaka yang memaparkan dasar-dasar yang menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian. Bab ini berisi pengertian mengenai independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, integritas auditor dan kualitas hasil audit, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab tiga adalah metode penelitian yang berisi tentang kerangka operasional penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan.

Bab empat adalah analisis data dan pembahasannya. Bab ini menguraikan tentang analisis hasil penelitian yang merupakan inti dari penelitian ini. Secara garis besar, bab ini berisikan deskripsi hasil penelitian berdasarkan data-data

yang telah dikumpulkan, pengujian, dan pembahasan hasil penelitian yang akan diuraikan.

Bab lima adalah bab penutup yang berisi hasil akhir penelitian yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran.